

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kabupaten Jombang

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Jombang mempunyai letak yang sangat strategis, karena berada pada bagian tengah Jawa Timur dan dilintasi Jalan Arteri Primer Surabaya–Madiun dan Jalan Kolektor Primer Malang–Babat. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang sebagai daerah wisata dan kota pelajar serta kota industri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Secara geografis Kabupaten Jombang terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada antara 50 20' 01" sampai 50 30' 01" Bujur Timur dan 070 24' 01" dan 070 45' 01" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.159,50 Km². Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian + 44 m diatas permukaan laut. Secara topografis, Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 (tiga) sub area, yaitu :

- a. Kawasan Utara, bagian pegunungan kapur muda Kendeng yang sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian berbukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu dan Ngusikan.
- b. Kawasan Tengah, sebelah selatan sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok bagi tanaman padi dan palawija, karena irigasinya cukup bagus meliputi Kecamatan Bandar Kedungmulyo,

Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang dan Kesamben.

- c. Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan, cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno dan Wonosalam.

Faktor penting yang sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah, diantaranya adalah aliran sungai yang cukup besar dan material hasil letusan gunung berapi. Dimungkinkan bahwa hasil letusan Gunung Kelud terbawa arus deras sungai Brantas, kali Konto dan sungai-sungai lainnya yang mengalir dari selatan/tenggara ke utara masuk melintasi wilayah Kabupaten Jombang. Penggunaan tanah di Kabupaten Jombang didominasi oleh sawah yang mencapai 42,19 persen dari luas wilayah kabupaten, kemudian permukiman/perumahan 24,08 persen, hutan 19,46 persen, tegal 11,62 persen dan penggunaan lainnya 2,65 persen.

2. Visi, Misi Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dengan mempertimbangkan potensi Kabupaten Jombang dan memperhatikan RPJP Nasional Tahun 2005-2025, maka Visi Kabupaten Jombang tahun 2005–2025 adalah: “Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025” Visi Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur; yang dilaksanakan dengan berpijak pada keunggulan dan kemampuan sendiri. Adapun yang dimaksud dengan sentra agribisnis adalah terintegrasinya semua aspek pembangunan pertanian, mulai dari sektor industri hulu pertanian, pertanian primer, industri hilir pertanian, dan jasa-jasa penunjang yang berkaitan secara simultan dan harmonis.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi RPJP Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, maka ditetapkanlah misi sebagai berikut:

- 1). Mengembangkan tata pemerintahan yang baik, yaitu mengandung makna penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.
- 2). Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu dengan mengupayakan partisipasi seluruh komponen

masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar pembangunan di Kabupaten Jombang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompetensi tinggi dan mempunyai keunggulan kompetitif, mempunyai integritas dan jati diri masyarakat santri yang dipandu oleh nilai-nilai luhur budaya dan agama.

- 3). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian dan produk unggulan daerah, yaitu mengembangkan daerah dengan memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada kekuatan sektor pertanian dan produk unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menumbuhkan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan; serta memantapkan program penanggulangan kemiskinan.
- 4). Meningkatkan pelayanan infrastruktur, melalui penyediaan infrastruktur wilayah sesuai dengan kebutuhan bagi kegiatan sektor pertanian, peningkatan pelayanan umum, dengan tetap konsisten pada rencana tata ruang yang diakui

3. Keadaan Cuaca dan Iklim

Keadaan iklim di Kabupaten Jombang mempunyai curah hujan yang relatif rendah karena terletak pada ketinggian 500 meter dari permukaan air laut yakni berkisar antara 1750 – 2500 mm pertahunnya. Sedangkan untuk daerah yang

terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air laut, rata-rata curah hujannya mencapai 2500 mm pertahunnya.

Kabupaten Jombang termasuk kategori iklim tropis, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan menurut klasifikasi yang diberikan oleh Smidt dan Ferguson termasuk tipe iklim D. Dimana tipe ini biasanya musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober dan musim penghujan jatuh pada bulan Oktober sampai April. Curah Hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Kesamben berdasar hasil pengukuran hujan di pos pengukur hujan biasa di Krandekan. Sedangkan hari hujan terbanyak juga terjadi di wilayah Kecamatan Kesamben.

4. Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang

Secara administrasi Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan serta meliputi 1.258 dusun. Ditinjau dari komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Sumobito memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 21 desa. Namun bila ditinjau dari luas wilayah, terdapat 3 Kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan luas 121,63 Km², Kecamatan Plandaan dengan luas 120,40 Km² dan Kecamatan Kabuh dengan luas 97,35 Km².

Pada tahun 2012 ini jumlah Aparatur Pemerintah Daerah (CPNS/PNS) di Kabupaten Jombang sebesar 12.422 orang, sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan S-1, yaitu sebanyak 5.981 orang. Tingkat pendidikan SLTA atau yang Sederajat sebanyak 3.157 orang, berpendidikan SD sebanyak 280 orang, D1/D2/D3/Akademi 2.115 orang, berpendidikan SLTP atau yang sederajat sebanyak 488 orang, sedangkan sisanya sebanyak 401 orang berpendidikan S2/S3.

Dari 50 keanggotaan legislatif yang ada, 47 orang berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya 3 orang berjenis kelamin perempuan, dan seluruhnya berpendidikan minimal setingkat SLTA sederajat.

Dalam paradigma baru, tujuan pembangunan Nasional adalah mencapai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang maju, modern dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari paradigma baru tersebut tergambar jelas bahwa penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan. Sehingga data kependudukan merupakan piranti yang sangat diperlukan guna mengetahui profil penduduk di suatu wilayah dengan berbagai masalah sosial yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil Registrasi jumlah penduduk Kabupaten Jombang akhir tahun 2012 sebesar 1.348.199 jiwa. Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 148.494 jiwa atau 11,01 persen dari total penduduk Kabupaten Jombang. Kepadatan penduduk Kabupaten Jombang sedikit meningkat dari 1.013 jiwa/km² pada tahun 2011 menjadi 1.159 jiwa/km² pada tahun 2012. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jombang sebagai Ibukota Kabupaten dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Wonosalam, Kabuh, Plandaan dan Ngusikan. Sex rasio yang merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan dikalikan seratus, menunjukkan bahwa sex rasio penduduk Kabupaten Jombang 2012 adalah 100,44 artinya setiap 10.000 penduduk perempuan terdapat 10.044 penduduk laki-laki.

B. Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Perda Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009

Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pembangunan nasional terus dilaksanakan demi keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi disegala bidang kehidupan masyarakat khususnya pada pembangunan. Secara yuridis formal keberadaan desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ketentuan, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Apabila bantuan tersebut dikelola dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih terasa dalam pembangunan infrastruktur yang menjembatani kelangsungan kehidupan masyarakat.

Sumber dana yang berasal dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 2 terdiri dari: Pendapatan asli Desa terdiri atas

hasil usaha, swadaya dan partisipasi, gotong royong, hasil aset, dan lain-lain pendapatan asli Desa; Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Bagiandari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota; Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan pendapatan lain yang sah.

Strategi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Jombang yaitu dengan mengoptimalkan anggaran dari berbagai sumber, seperti yang disampaikan oleh Kepala *Dinas Pekerjaan Umum* Kabupaten Jombang:

“Mengenai upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Jombang ini diberikan anggaran, baik melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi, PNPM dan Swadaya masyarakat. Karena memang fungsi anggaran dalam pembangunan itu sangat penting agar pembangunan dapat terimplementasi dengan baik dan tepat sasaran”¹

Dalam mengatur keuangan desa tersebut Bupati Jombang mengeluarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dan dari pengelolaan tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur seberapa besar pengeluaran dana tersebut. Untuk pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara salah satunya adalah pembagian rasio keuangan dari pemerintah pusat ke daerah. Beberapa tahun terakhir tentang perkembangan pembangunan fisik dari tahun 2010, 2011, dan 2012 bahwa lingkup masalah

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Hari Oetomo. M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jombang, tanggal 28-29 Januari 2015

pembangunan yang dirasakan masih transparan, dan juga kurang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menunjang sarana dan prasarana.

Dilihat dari kualitas pembangunannya, jalan rabat beton kurang memenuhi dikarenakan adanya bestek bahan bangunan. Masalah efektifitas dana tahun 2012 juga yang paling menonjol pada pembangunan jalan rabat beton yang menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten (ADD) karena pembangunan yang dilakukan hingga tahun 2014 kualitas jalan rabat beton tidak memenuhi fungsinya untuk jangka waktu yang lama, realisasi dilapangan dalam bentuk sarana fisik yang nyata terlihat semakin rusak dan bisa dibilang tidak layak dipergunakan sehingga perlu diperbaiki. Namun, sejalan dengan hal tersebut sarana fisik tersebut berjalan tidak mencapai kurun waktu yang telah di rencanakan misalnya saja bisa bertahan selama bertahun-tahun tetapi realitanya hanya berjalan beberapa tahun saja.

Selain kualitas SDM aktor pembangunan dukungan dana pembangunan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, khususnya pembangunan jalan desa. Proses penggalangan dana pembangunan, seperti yang disampaikan oleh salah seorang kepala desa:

“Selama ini proses penggalangan dana untuk pembangunan jalan desa dilakukan oleh dinas terkait dengan pembangunan prasarana jalan yang diperintahkan untuk membuat usulan anggaran terkait dengan kebutuhan. Kalau untuk sumber keuangan desa dalam melakukan pembangunan fisik berasal dari pemerintah dan swadaya, rincian dana pembangunan tersebut di masukkan ke dalam APBDes kemudian direkap dalam Laporan Realisasi Anggaran”.²

²Hasil wawancara dengan Bapak Supono selaku Kepala Desa di Kabupaten Jombang, tanggal 30 Januari 2015

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu titik berat pembangunan Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Namun demikian hingga saat ini masih terjadi kesenjangan antar wilayah, baik antar wilayah pedesaan maupun antar desa dan kota. Berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah telah lama dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program nasional. Dimulai pada tahun 1994, pemerintah menjalankan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang kemudian dilanjutkan dengan program-program lainnya. Seperti halnya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, yaitu:³ bahwa strategi perwujudan sistem jaringan jalan yang dapat meningkatkan akses ke seluruh bagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

1. Menata keterhubungan antara sirkulasi jalan lokal, jalan kolektor, jalan arteri dan jalan bebas hambatan;
2. Mengembangkan jalan lingkar kabupaten;
3. Mengembangkan jalan primer sebagai jalur penghubung kebutuhan proses produksi dan distribusi hasil pertanian antar pedesaan serta antar pedesaan dengan perkotaan;
4. Mengembangkan jalan desa sebagai jalan usaha tani guna meningkatkan akses jalur dan jaringan keterhubungan antar kawasan produksi;
5. Meningkatkan jaringan jalan di kawasan agropolitan untuk memudahkan pergerakan dan kegiatan;

³ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang. Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7A

6. Meningkatkan jaringan lokal primer yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Dengan dibangunnya sarana transportasi (dalam hal ini infrastruktur desa), kegiatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah untuk dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu proses interaksi antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil sekalipun sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Dengan demikian diperlukan suatu strategi pembangunan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti disampaikan Kepala *Dinas Pekerjaan Umum* Kab. Jombang:

“Dalam rangka memperkuat proses perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang tahapannya melalui proses musrenbang. Rangkaian kegiatan musrenbang dimulai dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai dengan musrenbang kabupaten. Hasil musrenbang kecamatan yang berupa usulan program dan kegiatan diperhatikan oleh SKPD dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rancangan Renja SKPD merupakan rencana program, kegiatan dan indikasi anggaran SKPD yang secara lebih lanjut menjadi rencana anggaran pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD”.⁴

Perbaikan akses jalan bagi masyarakat desa di Kabupaten Jombang menjadi penting karena desa tersebut sebagai sentra pertanian membutuhkan infrastruktur jalan yang baik untuk memperlancar aksesibilitas masyarakat khususnya dalam

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Hari oetomo. M.Si selaku Kepala *Dinas Pekerjaan Umum* Kabupaten Jombang, tanggal 28-29 Januari 2015

hal pemasaran hasil-hasil pertanian. Dengan demikian perbaikan akses jalan diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan aksesibilitas masyarakat yang dapat dilihat dari kelancaran arus barang dari dan ke desa di Kabupaten Jombang dibandingkan dengan keadaan sebelumnya perbaikan akses jalan dilakukan. Dengan semakin lancarnya arus transportasi tersebut akan mengurangi biaya dan waktu pengangkutan sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan dalam pembangunan perdesaan. Upaya-upaya itu telah menghasilkan berbagai kemajuan signifikan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat perdesaan. Namun, masih banyak juga wilayah perdesaan yang belum berkembang secepat wilayah lainnya. Dengan demikian perlu adanya kebijakan percepatan dan pemerataan pembangunan, seperti yang disampaikan oleh Kabag Pembangunan:

“Dalam kebijakan umum pembangunan daerah, untuk tahun 2015 diarahkan pada pemantapan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang pertumbuhan kawasan. Kebijakan umum tersebut sekaligus juga sebagai tema pembangunan tahun 2015. Pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2015 diarahkan dalam mendukung pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur dasar, mulai dari jalan di lingkungan permukiman dan antar permukiman, jaringan drainase, serta infrastruktur penunjang pertumbuhan kawasan, yaitu kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh yang telah diskenariokan dalam rencana tata ruang wilayah daerah”.⁵

Dalam rangka kegiatan percepatan pembangunan perdesaan, akan terus dilakukan berbagai program yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan,

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Bambang Edi Prasetyo M.Si selaku Kabag Pembangunan di Kabupaten Jombang, tanggal 30 Januari 2015

peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan perdesaan. Perlu adanya kesadaran bahwa hakikat pembangunan nasional yang komprehensif adalah meletakkan penopang yang kokoh atau fondasi pada pembangunan di wilayah perdesaan.

“Menurut saya selama ini pembangunan jalan di desa, manfaat dan hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat masih belum bisa dirasakan secara merata. Untuk itu, kepada segenap elemen perencana di tingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa untuk lebih fokus pada identifikasi permasalahan dan faktor penyebabnya. Ketepatan dalam menganalisa permasalahan serta faktor penyebabnya harus diuraikan secara baik, sehingga dalam merumuskan program dan kegiatan yang benar-benar menyelesaikan permasalahan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat sesuai dengan yang diharapkan”.⁶

Kemiskinan yang terjadi di perdesaan ditimbulkan karena adanya masalah ekonomi dan juga kondisi fisik daerahnya yang terpencil, serta keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi sehingga mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh kemampuan dan keterampilan, termasuk informasi dan teknologi tepat. Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan perdesaan yang diarahkan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam Mengimplementasikan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang membutuhkan dana yang cukup besar, sementara dana yang tersedia sangat terbatas. Pengembangan sub sektor ekonomi yang diunggulkan

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Supono selaku Kepala Desa di Kabupaten Jombang, tanggal 30 Januari 2015

masih belum tepat dan merata di wilayah kabupaten Jombang, selain itu juga ada permasalahan pengembangan ekonomi di Kabupaten Jombang adanya kondisi bertambahnya produsen atau produksi tidak diikuti dengan bertambahnya permintaan lokal dapat membuat harga jual menjadi turun. Angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian yang relatif rendah, jumlah rumah tangga miskin masih tinggi dan sebagian besar berada di wilayah pedesaan.

“Sebenarnya banyak kendala dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang ini, salah satunya adalah keterbatasan dana yang akan digunakan untuk pembangunan. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan ini mesti harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan”.⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwamasyarakat di Kabupaten Jombang cenderung mengandalkan bantuan dari pemerintah, dan tidak berusaha untuk menggali sumber dana sendiri yang ada di desa. Sehingga di sini, diperlukan manajemen sumber daya dan sumber dana, dengan proses yang edukatif dan memberdayakan. Dalam hal ini bahwa pembangunan infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembangunan desa adalah:

1. Pengembangan pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan prioritas dalam RPJM (Rencana Program Jangka Menengah) dan Renstra (Rencana Strategi) Departemen PU untuk mewujudkan revitalisasi pertanian dan perdesaan yang merupakan salah satu pilar pembangunan nasional yang harus didukung dengan pemenuhan kebutuhan pendukung produksi:

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Hari Oetomo. M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jombang, tanggal 28-29 Januari 2015

- a. Infrastruktur Pertanian.
 - b. Infrastruktur pendukung pemasaran pasca produksi
 - c. Infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa
2. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, dapat meliputi:
- a. Perencanaan pembangunan pedesaan harus didesain dengan konsep kebutuhan masyarakat.
 - b. Penganggaran pembangunan pedesaan harus diimbangi dengan kinerja berbasis kebutuhan masyarakat desa (petani, pedagang pasar, makanan olahan, dll)
 - c. Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan harus disertai dengan mekanisme pelibatan masyarakat desa.
 - d. Untuk perencanaan dan penganggaran yang sifatnya fisik dan pemerintahan desa, hankam/tanggap bencana harus di sertai dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan konsisten.
 - e. Untuk perencanaan dan penganggaran yang sifatnya ekonomi, sosial-budaya, harus disertai dengan mekanisme pelibatan masyarakat, target/tujuan akhir 1 tahun, konsep sustainabilitas, dan mekanisme pengawasan.

Manfaat dibangunnya jalan desa adalah untuk memperlancar hubungan dan komunikasi dengan tempat lain, mempermudah pengiriman sarana produksi ke desa, mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa maupun yang di luar dan meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan. Selain itu pembangunan sumber air dan poskamling

serta saluran air yang ada masih perlu adanya perbaikan sebagai bentuk realisasi pembangunan infrastruktur Desa di Kabupaten Jombang. Hal terpenting lagi adalah mengenai pemerataan pembangunan jalan di Kabupaten Jombang yang selama ini masih kurang merata, seperti yang disampaikan oleh salah satu kepala didesa di Kabupaten Jombang:⁸

“Setahu saya pembangunan jalan di Jombang ini kurang merata, seperti Dusun Kebon Agung dan Dusun Bawangan juga terkait kondisi infrastuktur yang cukup mendukung perkembangan wilayah tersebut. Sedangkan wilayah Dusun Tanjung Wadung, merupakan daerah yang kurang berkembang. Menurut saya mengenai pemerataan pembangunan ini harus diperhatikan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik”.

Dengan adanya dan terpenuhinya pembangunan infrastruktur yang memadai dimaksudkan untuk memperlancar pembangunan yang berada di desa. Desa dengan kualitas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, karena pembangunan infrastruktur ini manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pola pembangunan yang dianut oleh pemerintah pada saat ini *adalah bottom up planning*, seperti yang disampaikan oleh Kaur Pembangunan:

“Kalau proses pembangunan infrastruktur menurut saya yaitu dimulai dari Musrenbangdus di dusun sampai dengan Musrenbangprov di provinsi, bahkan sampai pada level pemerintahan pusat yakni Musrenbangnas. Melalui konsep pemberdayaan tersebut pemerintah membangun strategi untuk mulai meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan”.⁹

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Supono selaku Kepala Desa di Kabupaten Jombang, tanggal 30 2015

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Bambang Edi Prasetyo. M.Si selaku Kabag Pembangunan di Kabupaten Jombang, tanggal 2-3 Januari 2015

musyawarah (yang sering disebut musrenbangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan desa yang *Accountable*, (pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan). Selain itu harus *transparent*, (terbuka kepada masyarakat). *Acceptable*, (musyawarah). *Sustainable*, (dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan).

Karena selama ini permasalahan di desa adalah terfokus pada pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik (SDM). Kedua hal inilah yang menjadi faktor Kemiskinan yang didera masyarakat Desa, khususnya petani antara lain akibat masih rendahnya sumber daya manusia (SDM). Rendahnya SDM di pedesaan ini salah satunya dikarenakan paradigma berpikir masyarakat dan juga pengambil kebijakan pembangunan yang menganggap pembangunan hanya bersifat fisik semata. Sedangkan pembangunan non fisik, seperti pendidikan hampir diabaikan.

Sebagian besar perdesaan di Kabupaten Jombang boleh dikatakan memiliki sumber daya manusia yang melimpah namun dikarenakan SDM belum memadai, tingkat pendidikan formal yang rendah atau tidak menyelesaikan pendidikan dasar sehingga produktivitas masih rendah, tidak mampu menghasilkan produk olahan dan komoditas primer yang bernilai tambah lebih tinggi.

“Pembangunan Fisik adalah wujud dari Perkembangan Desa, akan tetapi pada saat ini sarana dan prasarana Desa masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal pencapaian Pembangunan yang berkelanjutan. Dikarenakan hal

tersebut, dana merupakan faktor dasar dalam meningkatkan Pembangunan Desa yang selama ini menjadi kendala dalam pembangunan”.¹⁰

Pengembangan sarana dan prasarana di desa dilakukan dengan mengidentifikasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan desa, identifikasi peran masyarakat dan terbentuknya unit pengelola sarana (UPS) dan kelompok pengelola sarana (KPS) dalam penentuan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan, serta tersusunnya rencana perhubungan desa. Di samping itu, bantuan juga diberikan untuk perbaikan perumahan dan permukiman warga, serta sanitasi lingkungan dan tersedianya air bersih. Hal itu yang menjadi dasar komitmen kuat pemerintah untuk selalu berupaya memberikan bantuan kepada desa-desa yang mengajukan permohonan bantuan pembangunan jalan. Pembangunan jalan tersebut sebagian didanai oleh PNPM Mandiri. Pengajuan dana untuk pembangunan infrastruktur desa sangat penting untuk menopang pembangunan, khususnya pembangunan jalan desa.

D. Upaya Pemerintah Daerah untuk Mengatasi Hambatan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan perdesaan di Kabupaten Jombang selama ini diupayakan melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Keberdayaan dan kemandirian tercermin pada terpenuhinya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi perdesaan, serta meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan berperannya lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam penyediaan

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Bambang Edi Prasetyo. M.Si selaku Kabag Pembangunan di Kabupaten Jombang, tanggal 2-3 Januari 2015

permodalan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur desa juga penting untuk diperhatikan oleh pemerintah setempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti antisipasi terhadap bencana alam.

“Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat serta mencegah adanya bencana yang mungkin timbul, yang dampaknya dapat merugikan masyarakat luas, perlu diupayakan penyiapan infrastruktur fisik di pedesaan berupa pengendalian banjir yang selama ini sering melanda di desa-desa”.¹¹

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat perlu dilakukan upaya untuk mencegah bencana banjir dan kekeringan yang sering terjadi akibat irigasi yang buruk atau tidak adanya irigasi; dan menunjang akses terhadap pangan melalui pembangunan jalan dan sistem transportasi di pedesaan karena diharapkan setiap pembangunan jalan di pedesaan akan mempunyai nilai *multiplier effect* yang jauh lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi pertanian dibandingkan dengan jalan utama di perkotaan. Dengan demikian pemerintah daerah di Kabupaten Jombang dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dan keluarganya (prasarana air bersih, transportasi, irigasi pedesaan dan sanitasi). Dari sasaran yang dapat dikembangkan dalam suatu pembangunan desa di atas dibutuhkan kesadaran masyarakat desa untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan, walaupun pembangunan selalu didukung pendanaan dari kabupaten.

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Bambang Edi Prasetyo. M.Si selaku Kabag Pembangunan di Kabupaten Jombang, tanggal 2-3 Januari 2015

Pembangunan sarana desa sebagai bagian dari kesejahteraan sosial adalah usaha yang seharusnya terencana dan terarah meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Ciri utama pembangunan sosial adalah *holistik-komprehensif* dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektifitas.

Untuk mencapai sasaran kegiatan pembangunan desa, pemerintah telah menggariskan dalam program pembangunan masyarakat desa sebagai sasaran utama pembangunan desa adalah pembangunan prasarana fisik. Prasarana-prasarana desa sangat membantu masyarakat desa dalam mengembangkan dan meningkatkan pendapatan sosial ekonomi serta dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berada di daerah pedesaan.

Pemerintah berusaha untuk melaksanakan dan mencapai sasaran program desa yang akan diberdayakan dengan kegiatan sosial, ekonomi pertanian dan prasarana jalan. Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:¹²

1. Pembangunan jalan desa;
2. Pembangunan jembatan desa;
3. Pengembangan koperasi simpan pinjam;
4. Pengembangan ternak;
5. Pembuatan saluran air bersih;
6. Pembuatan saluran tali air persawahan.

¹²Sumber: Dokumen Desa di Kabupaten Jombang, 2013

Pembangunan masyarakat desa dilandaskan pada suatu keyakinan dimana kesadaran masyarakat dan tekad untuk mempertinggi tingkat penghidupan dan kehidupan masyarakat yang lebih layak dimulai dari desa, merupakan faktor yang penting menuju kepada perbaikan sosial dan ekonomi masyarakat. Disamping itu, pembangunan masyarakat desa mempunyai sifat komprehensif yang berarti adalah kegiatan dalam pembangunan masyarakat desa meliputi seluruh lapangan yang mencakup semua kehidupan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa juga merupakan salah satu bagian integral dari sebuah pembangunan nasional, sehingga keberhasilan dalam pembangunan desa merupakan salah satu tolak ukur yang menentukan keberhasilan tidaknya pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pembangunan perdesaan, sejak tahun 1969/70 anggaran telah dialokasikan sebagai Bantuan Pembangunan Desa, yang terus berlanjut hingga tahun anggaran berjalan. Dalam penyempurnaannya Bantuan Pembangunan Desa merupakan bantuan stimulan untuk menggali potensi dalam pembangunan desa, sehingga pada akhirnya masyarakat desa mampu dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah adanya Hakekat Bantuan Pembangunan Desa yaitu bantuan keuangan dari pemerintah kepada masyarakat desa, dengan maksud supaya masyarakat desa dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan desa. Tujuan Bantuan Pembangunan Desa itu adalah untuk memperkuat, mendukung, sekaligus menstimulan potensi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu: Meningkatkan kualitas SDM,

Meningkatkan fungsi dan peranan kelembagaan aparat desa, Mengembangkan dan pemeratakan prasarana dan sarana sosial untuk melayani kebutuhan masyarakat desa, Mengembangkan ekonomi rakyat di perdesaan lewat pengembangan usaha ekonomi produktif, Komponen dan Arah Bantuan Pembangunan Desa.

Penggalangan dan penggunaan sumber dana untuk membangun sarana fisik desa diperoleh dari bantuan pusat, kabupaten maupun swadaya. Namun pemerintah desa lebih berorientasi pada bantuan propinsi maupun pusat, seperti yang disampaikan oleh salah satu kepala desa di Kabupaten Jombang:

“Kalau masalah penggalangan dana Pemerintah desa selalu berupaya untuk mengajukan usulan program kepada pemerintah kabupaten propinsi maupun pemerintah pusat guna mendapat dana pembangunan yang kemudian didukung dengan dana swadaya yang telah diperoleh dari masyarakat”.¹³

Bantuan Pembangunan Desa ini memiliki komponen dan arah, seperti halnya bantuan langsung dikatakan sebagai komponen Bantuan Pembangunan Desa yang diberikan kepada masyarakat desa untuk mendukung dalam pencapaian sasaran pembangunan desa melalui sektor-sektor yang sudah tertampung dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) dan menjadi prioritas masing-masing desa, pelaksanaannya dikelola oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Pemilihan prioritas dijadikan sebagai dasar penggunaan bantuan yang dilakukan dengan maksimal untuk merujuk pada dokumen perencanaan seperti halnya Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).

¹³Hasil wawancara dengan Bapak supono selaku Kepala Desa di Kabupaten Jombang, tanggal 30 Januari 2015

Sedangkan untuk bantuan yang lainnya adalah Bantuan Pembangunan Desa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan bantuan langsung dan khusus yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat. Bantuan Pembangunan Desa yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan dan stimulan pembangunan di desa, dengan dasar penekanan penggunaannya seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di desa, pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, pengembangan prasarana dan sarana desa dan pengembangan kelembagaan. Selain itu, penggunaan bantuan yang lain-lain terkait dengan Bantuan Pembangunan Desa adalah sebagai hasil pembangunan desa.

Dalam rangka untuk mencapaitujuan pemberian Bantuan Pembangunan Desa tersebut, terdapat 5 (lima) prinsip pokok sebagai berikut:¹⁴ (1) Bantuan mudah diterima dan dipergunakan oleh masyarakat. (2) Bantuan dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan (3) Bantuan harus dapat memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (4) Bantuan harus dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri, sehingga menciptakan pemupukkan modal dalam wadah lembaga dana dan kredit perdesaan setempat (5) Pengelolaan bantuan dan pelestarian hasil dapat dengan mudah dipantau oleh masyarakat serta dapat digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Di samping itu, diberikan pula bantuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat melalui upaya peningkatan daya guna kelembagaan desa, pembinaan

¹⁴ <http://gunawans.tripod.com/bangdes.html>

lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) dan penyelenggaraan Bulan Bakti LKMD. Sistem pendataan desa ini dilaksanakan dengan menggunakan profil desa atau kelurahan yang divisualisasikan dalam bentuk peta desa yang memuat potensi desa atau kelurahan, tingkat perkembangan dan batas-batas desa. Pembinaan LKMD juga lebih dimantapkan dengan menggunakan beberapa indikator keberhasilan LKMD, yaitu jumlah pengurus, struktur organisasi, program kerja, dan fungsi LKMD. Penyelenggaraan Bulan Bakti LKMD merupakan krida pembangunan bagi masyarakat, yang dilaksanakan setiap bulan Maret bersamaan dengan penyusunan rencana musyawarah pembangunan desa (Musbangdes).

Salah satu arahan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005–2025 seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah yang merupakan perwujudan pembangunan yang merata ke seluruh wilayah. Untuk itulah dalam Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disebutkan bahwa arah dan kebijakan pembangunan kewilayahan salah satunya akan dituangkan dalam arah pengembangan pulau-pulau besar, pengembangan wilayah laut dan pengembangan kawasan/antar kawasan. Arahan pengembangan kawasan/antar kawasan tersebut pada dasarnya merupakan salah satu upaya dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah yang dapat dilakukan melalui :

- (1) Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;
- (2) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan rawan bencana;

- (3) Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- (4) Penataan dan pengelolaan pertanahan.

Pemerintah telah menetapkan 11 (sebelas) prioritas dalam Program Aksi Pembangunan Nasional 2010-2014, di mana dari 11 prioritas tersebut terdapat 8 (delapan) prioritas yang terkait dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang seperti yang tercantum dalam Renstra Kementerian PU 2010 –2014 yang meliputi:

- (1)Prioritas pembangunan infrastruktur;
- (2)Prioritas bidang kesehatan;
- (3)Prioritas penanggulangan kemiskinan;
- (4)Prioritas ketahanan pangan;
- (5)Prioritas pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
- (6)Prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
- (7)Prioritas bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
- (8)Prioritas iklim investasi dan iklim usaha.

Terkait prioritas tersebut Kementerian PU melakukan dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan salah satunya melalui program-program pembangunan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, dukungan terhadap kawasan perbatasan dan kawasan terpencil serta terisolir. Adapun kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penatan ruang yang terkait dengan prioritas ke-5 tersebut adalah pembangunan infrastruktur yang

sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar pada bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.

Oleh karena itu diperlukan keseriusan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur jalan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, yaitu:¹⁵ bahwa strategi perwujudan sistem jaringan jalan yang dapat meningkatkan akses ke seluruh bagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Menata keterhubungan antara sirkulasi jalan lokal, jalan kolektor, jalan arteri dan jalan bebas hambatan; Mengembangkan jalan lingkaran kabupaten;
- b. Mengembangkan jalan lokal primer sebagai jalur keterkaitan kebutuhan proses produksi dan distribusi hasil pertanian antar perdesaan serta antar perdesaan dengan perkotaan;
- c. Mengembangkan jalan desa sebagai jalan usaha tani untuk peningkatan akses dan jaringan keterhubungan antar kawasan produksi dan pusat distribusi;

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang. Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7A

- d. Meningkatkan jaringan jalan di kawasan agropolitan untuk memudahkan pergerakan dan kegiatan;
- e. Meningkatkan jaringan lokal primer yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Karena selama ini pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jombang ditempuh melalui berbagai program walaupun belum terimplementasi secara optimal. Seperti (1) pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, (2) peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan, (3) pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan, dan (4) perencanaan program, rencana kerja, dan anggaran. Namun upaya tersebut belum seluruhnya terimplementasi dengan baik karena berbagai kendala.

Mengacu pada hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Perda Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 adalah dengan diberikan anggaran kemudian menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diarahkan untuk mendukung pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur dasar yaitu kawasan-kawasan strategis yang diskenariokan dalam rencana tata ruang wilayah daerah. Sedangkan hambatan dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur jalan adalah keterbatasan dana untuk pembangunan. Dengan demikian upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi hambatan peningkatkan pembangunan infrastruktur jalan yaitu

penyiapan infrastruktur fisik di perdesaan dengan mengajukan usulan program pada pemerintah kabupaten propinsi maupun pemerintah pusat.